

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memegang peran sentral dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berfungsi sebagai fondasi fundamental yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi yang melekat pada setiap warga negara. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 31 Dan 32 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan akses pendidikan, sementara pemerintah berkewajiban memastikan tersedianya sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan inklusif. Di samping itu, dukungan hukum terkait pengembangan pendidikan nasional diperkuat melalui Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Nadziroh et al., 2018; Wartoyo, 2016). Melalui peran strategis pemerintah dan regulasi ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan pendidikan yang memadai dan berkualitas. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mendorong tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan (Putra, 2021).

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, individu dapat memperluas wawasan dan mengembangkan keterampilan yang berguna untuk mendukung kehidupan profesional. Di era Revolusi Industri 4.0, baik individu maupun

kelompok dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan besar yang terjadi secara terus-menerus. Dibutuhkan individu yang memiliki daya saing tinggi, keterampilan yang relevan, serta wawasan yang luas dalam menghadapi globalisasi yang semakin intensif. Namun, tidak semua individu atau kelompok mampu menyesuaikan keterampilan dan pengetahuan mereka dengan cepat seiring perkembangan zaman dan perubahan besar-besaran yang terjadi (Saputra, 2023). Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan keterampilan, membentuk karakter, dan menciptakan peradaban bangsa yang bermartabat. Hal ini bertujuan untuk mendukung tercapainya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa (Hermanto, 2020). Pendidikan menjadi bentuk investasi strategis bagi pembangunan nasional, yang hasilnya akan terlihat di masa depan (Susanto & Pangesti, 2019).

Langkah awal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat adalah dengan menghapus buta huruf melalui upaya menumbuhkan budaya membaca. Minat baca masyarakat dapat ditingkatkan melalui berbagai program pemerintah yang dirancang untuk mendorong ketertarikan masyarakat terhadap membaca (Saputri & Khairani, 2021; Septiana, 2021). Meskipun demikian, pemberantasan buta aksara masih menghadapi tantangan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, angka buta huruf di Indonesia masih 3,05% Indonesia masih belum sepenuhnya bebas dari buta huruf (BPS, 2024).

Pemerintah memiliki peluang besar untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memperluas keterjangkauan masyarakat terhadap bahan bacaan atau buku

melalui penyediaan sarana yang mudah diakses. Upaya ini sejalan dengan amanat Pasal 31 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membiayainya. Tujuan dari inisiatif ini adalah membuka peluang seluas-luasnya bagi individu dalam mengembangkan potensi diri sehingga mampu meraih kehidupan yang layak dan sejahtera. Dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan ini, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat direalisasikan secara lebih optimal (A. M. Sari & Widiyarta, 2024).

Salah satu elemen penting yang mendukung hal ini adalah keberadaan lembaga non-formal seperti perpustakaan. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, perpustakaan berfungsi sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pustaka serta mendukung proses pembelajaran, terutama bagi mereka yang kesulitan menyelesaikan pendidikan formal. Perpustakaan dapat menjadi tempat di mana pengunjung dapat memperoleh pengetahuan, berdiskusi, dan mencari jawaban ilmiah atas pertanyaan yang mereka hadapi (Eskha, 2018). Perpustakaan, sebagai salah satu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Keberadaan perpustakaan pemerintah diyakini mampu berperan signifikan dalam mendorong peningkatan budaya membaca di kalangan masyarakat (Sari & Widiyarta, 2024). Namun, menurut Pasaribu (2018) dalam (Wulansari et al., 2022), banyak masyarakat yang masih meragukan fungsi perpustakaan sebagai fasilitas

untuk memperkuat dan memberdayakan komunitas. Bahkan, perpustakaan sering dianggap belum maksimal dalam mendukung terciptanya kondisi yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Perpustakaan perlu bertransformasi agar mampu bertahan dan berkembang secara optimal, sehingga dapat mendukung perubahan dan kemajuan masyarakat. Transformasi ini memungkinkan perpustakaan dimanfaatkan secara maksimal sebagai pusat pembelajaran sekaligus alat untuk mendorong pengembangan individu yang inovatif dan kreatif. Selain itu, perpustakaan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam upaya tersebut, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi langkah strategis yang mencerminkan pengembangan fungsi perpustakaan. Proses ini dilakukan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Haryanti, 2019; Wiranda et al., 2022). Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional dalam laman Kompas.com:

Kompas.com-“Program TPBIS merupakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan di seluruh provinsi di Indonesia. Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando menyatakan, tugas perpustakaan adalah mencerdaskan dan menyejahterakan anak bangsa sesuai amanah UUD 1945. Esensinya, untuk mengurangi masyarakat marginal. Untuk itu, perpustakaan mesti bertransformasi mengubah paradigma yang eksklusif menjadi inklusif.”

Sumber:

(<https://www.kompas.com/edu/read/2022/12/05/181829171/program-transformasi-perpustakaan-kerek-kesejahteraan-masyarakat?page=all> diakses pada 1 Desember 2024)

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi perpustakaan dengan melibatkan masyarakat sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat

(Haryanti, 2019). Melalui pendekatan ini, perpustakaan diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penggunanya. Selain itu, perpustakaan berbasis inklusi sosial juga berperan aktif dalam membantu masyarakat mengembangkan keterampilan, membangun rasa percaya diri, serta memperluas jaringan sosial (Tania et al., 2023). Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) adalah inisiatif yang digagas oleh Perpustakaan Nasional dan diatur dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023. Program ini bertujuan untuk memperkuat fungsi dan peran perpustakaan dalam menyediakan layanan yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan TPBIS melibatkan berbagai masyarakat tingkatan wilayah, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dan kelurahan (Wiranda et al., 2022). Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional dalam laman Kompas.com:

Kompas.com-“ Kepala Perpustakaan Nasional Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan jika program TPBIS ini menyasar masyarakat yang termarjinalkan, seperti masyarakat di daerah kumuh, masyarakat di daerah miskin, petani kecil, petambak kecil, buruh, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sampai ibu-ibu rumah tangga. "Melalui program ini, masyarakat diberi pelatihan untuk meningkatkan skill melalui buku-buku terapan yang ada di perpustakaan," ucap dia dalam keterangannya, Kamis (13/4/2023).”

Sumber:

(<https://www.kompas.com/edu/read/2023/04/13/151900971/program-tpbis-jadikan-perpustakaan-sebagai-pusat-pengetahuan?page=all> diakses pada 1 Desember 2024)

Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, menghadapi tantangan dalam menguatkan pendidikan dan literasi sebagai elemen kunci dalam pembangunan masyarakat (Astuti, 2017). Di Pulau Jawa, Jawa Timur mencatat angka buta aksara sebesar 5,45%, menjadikannya salah

satu provinsi dengan tingkat buta aksara tertinggi di wilayah tersebut (BPS, 2024). Tantangan ini sejalan dengan data BPS tahun 2023, yang menunjukkan rata-rata lama sekolah di Jawa Timur hanya mencapai 8,11 tahun (BPS Jawa Timur, 2023). Kondisi ini menegaskan pentingnya literasi dan pendidikan sebagai pondasi utama dalam mendukung pendidikan dan memutus mata rantai kemiskinan (Sumanang, 2021). Jawa Timur dihadapkan pada tantangan besar dalam meningkatkan literasi dasar masyarakatnya, yang menjadi kunci untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan.

Menanggapi tantangan tersebut, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Regulasi ini berperan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam mengatur peran, kolaborasi, serta partisipasi aktif masyarakat untuk membangun sinergitas dalam implementasi program transformasi perpustakaan inklusif yang berkelanjutan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, memegang peran strategis sebagai perpustakaan pembina, pusat rujukan, pengelola koleksi deposit, ruang penelitian, hingga lembaga pelestarian informasi. Keberadaannya yang berlokasi di ibu kota provinsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, menegaskan fungsi dan kedudukannya sebagai pusat layanan literasi di tingkat provinsi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur telah mengimplementasikan TPBIS melalui berbagai program inovatif. Sejak tahun 2018, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur telah menjalankan TPBIS (Disperpusip Jatim, 2024). Program TPBIS tidak hanya fokus pada literasi

konvensional, tetapi juga pada pembinaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam website *jatimupdate.id* (2023):

Jatimupdate.id- ““Adanya program perpustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan dapat meningkatkan literasi informasi bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan juga mendorong kreativitas serta memangkas kesenjangan akses informasi,” katanya.”

Sumber: (<https://jatimupdate.id/baca-4148-upaya-transformasi-perpustakaan-berbasis-inklusi-sosial-untuk-tingkatkan-kunjungan-masyarakat> diakses pada 6 Oktober 2024)

Melihat kondisi pendidikan dan literasi di Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sangat diperlukan di daerah ini. Transformasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan literasi, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Perpustakaan dapat menjadi tempat yang efektif bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan diri serta meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, untuk terus berinovasi dan menerapkan strategi yang tepat guna meningkatkan peran perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat.

Terdapat tiga bentuk penerapan TPBIS di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yakni, peningkatan layanan, pelibatan masyarakat dan advokasi. Hal ini dibuktikan dalam wawancara bersama dengan Ibu Luwitasari, S.Sos selaku pegawai di Bagian Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur :

“...yang dilaksanakan itu adalah peningkatan layanan seperti menambah komputer, menambah titik baca di gazebo, fasilitas kelompok rentan. Kemudian pelibatan masyarakat ada kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti pelatihan, workshop, hidroponik dan aquaponik. Dan advokasi yang bekerjasama dengan CSR Bank Jatim, petrogas, rotary, PT. SIER, dinas koperasi dan umkm jawa timur, dinas pemerintahan masyarakat desa, dan perguruan tinggi...” (hasil wawancara 21 Oktober 2024).

Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur telah mengimplementasikan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Meskipun program ini sudah berjalan, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya keterlibatan masyarakat, yang disebabkan oleh sumber daya dari pihak pengelola perpustakaan. Dibuktikan dari wawancara bersama Ibu Dwinta selaku pegawai di Bidang Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur :

“...untuk tantangan kita juga harus menyesuaikan dengan anggaran yang kita punya, selain itu kadang kan untuk pelatihannya itu di Jawa Timur jauh-jauh ya nah mereka juga kadang ga ada biaya untuk kesini, kita juga tidak bisa memberi akomodasi, terus masih banyak masyarakat yang belum mengenal tpbis, jadi perlu ada penyadaran dari pihak pengelola supaya masyarakat mengerti bahwa di perpustakaan bisa belajar banyak hal, dari pegawai sendiri kan kami biasanya kerja di kantor terus juga kami harus belajar lagi untuk bisa memberikan pelatihan ke masyarakat, ...” (hasil wawancara 17 Oktober 2024)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa terdapat kendala dari anggaran dan sumber daya, serta Jawa Timur sendiri memiliki wilayah yang luas sehingga perlu strategi dan jangkauan. Hal ini menjadi kendala utama dalam penerapan strategi serta memperluas jangkauan program yang sesuai dengan tujuan TPBIS. Tantangan tersebut juga tercermin dalam data partisipasi masyarakat pada kegiatan pelibatan masyarakat dalam program TPBIS yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur (2024) sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Jumlah Keterlibatan Masyarakat dalam Program TPBIS
2024**

Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
Sosialisasi TPBIS	70 Peserta
Pelatihan Pembuatan Hantaran	30 Peserta
Pelatihan Pembekalan Kewirausahaan	15 Peserta
Pelatihan Pembuatan Takoyaki	11 Peserta
Pelatihan Pembuatan <i>Hampers</i>	25 Peserta
Pelatihan Pembekalan Kewirausahaan	15 Peserta

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur (2024)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, jumlah keterlibatan masyarakat dalam program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 masih tergolong rendah. Kegiatan yang diselenggarakan, seperti sosialisasi TPBIS dan berbagai pelatihan, hanya mampu menarik peserta dalam jumlah terbatas, yaitu antara 11 hingga 70 orang. Sebagai contoh, kegiatan sosialisasi TPBIS yang menjadi pintu awal untuk memperkenalkan program ini kepada masyarakat hanya diikuti oleh 70 peserta, sedangkan pelatihan lainnya seperti pembuatan takoyaki dan hampers hanya diikuti oleh 11 dan 25 peserta. Hal ini menunjukkan bahwa program TPBIS belum melibatkan masyarakat secara luas.

Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan TPBIS. Kurangnya partisipasi masyarakat bertentangan dengan tujuan utama TPBIS, yang menjadikan perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan memberikan dampak yang luas. Namun, masih banyak masyarakat yang belum

terjangkau oleh program TPBIS karena kurangnya sumber daya serta promosi dari pihak pengelola perpustakaan, yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Luwitasari, pegawai bidang Pemberdayaan

Sumber Daya :

“...kalau dari respon masyarakat dan berhasil atau tidak berhasil ya respon, memang harus bolak-balik mengenalkan, banyak promosi, dan publikasi supaya masyarakat lebih kenal dengan program TPBIS...” (hasil wawancara 21 Oktober 2024).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 21 Oktober 2024, ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan program dengan tingkat pengenalan masyarakat terhadap program tersebut. Program TPBIS belum sepenuhnya dikenal oleh publik, yang menunjukkan bahwa proses implementasi strategi belum berjalan secara optimal. Informan menyampaikan bahwa strategi yang digunakan perlu dilakukan secara lebih intensif, berkelanjutan, dan dilakukan secara berkala agar dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan bahwa meskipun TPBIS telah dilaksanakan, dampaknya masih terbatas karena belum tersusunnya pendekatan yang efektif dalam menjangkau dan melibatkan masyarakat secara luas. Peran institusi publik diharapkan tidak hanya sebagai penyedia layanan, melainkan juga sebagai fasilitator pemberdayaan. Diperlukan partisipasi warga, keadilan sosial, serta penciptaan nilai publik melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat (Sari, 2024).

Oleh karena itu, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial seharusnya mendorong keterlibatan aktif masyarakat, bukan sekadar menjadikan mereka sebagai objek layanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, institusi publik

dituntut untuk mengelola program dengan baik agar manfaat program dapat dirasakan secara nyata. Dalam konteks ini, teori manajemen strategi yang dikemukakan oleh Fred R. David (2019) menjadi relevan, karena menjelaskan bahwa strategi yang efektif terdiri dari tiga tahap utama: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Implementasi strategi menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan TPBIS, khususnya dalam hal pelibatan masyarakat secara aktif dalam program pelatihan dan pemberdayaan. Ketimpangan antara perencanaan strategis dan realisasi di lapangan menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

Hingga saat ini, penelitian mengenai Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur masih belum ditemukan, jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengeksplorasi lebih jauh serta menganalisis strategi yang diadopsi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan TPBIS. Dalam memahami permasalahan ini, penulis menggunakan teori manajemen strategi dari Fred R. David (2019), yang menekankan bahwa manajemen strategi adalah serangkaian tahapan dan pendekatan sistematis yang digunakan organisasi untuk menghadapi tantangan melalui proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan (Febria & Widiyarta, 2024). Fokus utama dari penerapan manajemen strategi adalah membuka potensi serta peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan. Melalui penelitian ini, penulis bermaksud membahas bagaimana strategi

dirumuskan, diimplementasikan, serta dievaluasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program TPBIS. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian “**Implementasi Strategi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, perumusan masalah yang akan dikaji adalah “Bagaimana Implementasi Strategi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, menganalisis, dan mendeskripsikan sejauh mana Implementasi Strategi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait strategi yang diterapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam memaksimalkan pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan yang berharga bagi penelitian-penelitian

selanjutnya, khususnya yang berfokus pada transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, diharapkan penulis dapat memperluas cakrawala pemahaman serta pengetahuan akademis, sekaligus memperoleh referensi yang bermanfaat sebagai bekal dalam pengembangan kapasitas diri di masa mendatang.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif berupa masukan yang konstruktif dan menjadi landasan evaluasi bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam upaya menyusun strategi yang lebih efektif untuk mengimplementasikan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini berpotensi menjadi tambahan referensi akademik yang relevan serta bahan bacaan yang bermanfaat untuk mendukung kebutuhan koleksi literatur di perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.